

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan merupakan sebuah masalah terhadap fungsi tubuh atau strukturnya. Suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi menurut penulis disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dalam melakukan suatu aktivitas. Penyandang disabilitas terdiri dari :

1. Penyandang cacat fisik
2. Penyandang cacat mental
3. Penyandang cacat fisik dan mental

Meskipun demikian mereka berhak dilindungi dan dilayani oleh pemerintah, sebab pemerintah memiliki tugas untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat hal ini sebagaimana terdapat pada alinea ke IV pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam

menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan, kesehatan, bahkan juga perumahan, Pendidikan, dan kegiatan sosial.

Di Indonesia penyandang disabilitas terus meningkat, berdasarkan kutipan dari www.kemensos.go.id hasil pendataan jumlah penyandang disabilitas pada Sembilan provinsi sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari-hari. Sekitar 67,33% penyandang cacat dewasa tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan, serta jumlah penyandang cacat tertinggi berada di provinsi Jawa Barat (50,96%).

Selain dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jaminan pemerintah kepada penyandang disabilitas tersirat juga pada pada Pancasila yaitu sila kedua bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya hal ini di dipertegas pula dalam Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 1 yang berbunyi “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Dari landasan hukum di atas sudah sangat jelas bahwa kewajiban dari negara/ pemerintah adalah menyediakan pelayanan atau aksesibilitas bagi warganya, baik yang normal atau yang mempunyai fisik yang sempurna maupun warga negara penyandang cacat atau disabilitas, karena pelayanan publik

merupakan aksesibilitas serta hak yang seharusnya di dapatkan bagi penyandang disabilitas untuk kelangsungan hidupnya.

Pada tingkat Kabupaten/Kota Pemerintah juga membuat peraturan daerah seeperti halnya di Kota Bandung, bahwa pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2009. Adapun menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 tahun 2009 bagian ke 2 pasal 29 dan 30, mengharuskan bahwa hak penyandang disabilitas meliputi penyediaan aksesibilitas. Yang dimaksudkan dengan penyediaan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 tahun 2009 bagian ke 2 pasal 29 dan 30 sebagai berikut:

1. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
2. Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk:
 - a. Fisik
 - b. Non fisik
3. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum
 - c. Aksesibilitas pada pertanaman dan pemakaman umum
 - d. Aksesibilitas pada angkutan umum

e. Aksesibilitas pada sarana keagamaan

4. Pada pasal 29 aksesibilitas yang berbentuk non fisik yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pelayanan informasi

b. Pelayanan Khusus

Kota Bandung sebagai wilayah cakupan Jawa Barat, berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat jumlah penyandang cacat di Kota Bandung pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mencapai angka 5359 dari keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Bandung, berdasarkan kutipan dari Dinas Sosial Kota Bandung.

Tabel 1.1
Rekap Jumlah Penyandang Disabilitas Per-Kecamatan
Kota Bandung Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Andir	267
2.	Antapani	84
3.	Arcamanik	149
4.	Astanaanyar	129
5.	Babakan Ciparay	352
6.	Bandung Kidul	119
7.	Bandung Kulon	306
8.	Bandung Wetan	102

9.	Batununggal	377
10.	Bojongloa Kaler	265
11.	Bojongloa Kidul	251
12.	Buahbatu	112
13.	Cibeunying Kaler	136
14.	Cibeunying Kidul	236
15.	Cibiru	242
16.	Cicendo	174
17.	Cicadap	98
18.	Cinambo	76
19.	Coblong	306
20.	Gedebage	74
21.	Kiaracondong	323
22.	Lengkong	111
23.	Mandalajati	123
24.	Panyileukan	66
25.	Rancasari	93
26.	Regol	141

27.	Sukajadi	270
28.	Sukasari	64
29.	Sumur Bandung	68
30.	Ujung Berung	218
Jumlah		5359

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung(2015)

Tabel 1.2
Rekap Jumlah Penyandang Disabilitas Per-Kecamatan
Kota Bandung Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Andir	267
2.	Antapani	84
3.	Arcamanik	149
4.	Astanaanyar	129
5.	Babakan Ciparay	352
6.	Bandung Kidul	119
7.	Bandung Kulon	306
8.	Bandung Wetan	102
9.	Batununggal	377
10.	Bojongloa Kaler	265

11.	Bojongloa Kidul	251
12.	Buahbatu	112
13.	Cibeunying Kaler	136
14.	Cibeunying Kidul	236
15.	Cibiru	242
16.	Cicendo	174
17.	Cicadap	98
18.	Cinambo	76
19.	Coblong	306
20.	Gedebage	74
21.	Kiaracondong	323
22.	Lengkong	111
23.	Mandalajati	123
24.	Panyileukan	66
25.	Rancasari	93
26.	Regol	141
27.	Sukajadi	270
28.	Sukasari	64

29.	Sumur Bandung	68
30.	Ujung Berung	218
Jumlah		5359

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung(2016)

Tabel 1.3
Rekap Jumlah Penyandang Disabilitas Per-Kecamatan
Kota Bandung Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Andir	267
2.	Antapani	84
3.	Arcamanik	149
4.	Astanaanyar	129
5.	Babakan Ciparay	352
6.	Bandung Kidul	119
7.	Bandung Kulon	306
8.	Bandung Wetan	102
9.	Batununggal	377
10.	Bojongloa Kaler	265
11.	Bojongloa Kidul	251

12.	Buahbatu	112
13.	Cibeunying Kaler	136
14.	Cibeunying Kidul	236
15.	Cibiru	242
16.	Cicendo	174
17.	Cicadap	98
18.	Cinambo	76
19.	Coblong	306
20.	Gedebage	74
21.	Kiaracondong	323
22.	Lengkong	111
23.	Mandalajati	123
24.	Panyileukan	66
25.	Rancasari	93
26.	Regol	141
27.	Sukajadi	270
28.	Sukasari	64
29.	Sumur Bandung	68

30.	Ujung Berung	218
Jumlah		5359

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung(2017)

Tabel 1.4
Rekap Jumlah Penyandang Disabilitas Per-Kecamatan
Kota Bandung Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Andir	267
2.	Antapani	84
3.	Arcamanik	149
4.	Astanaanyar	129
5.	Babakan Ciparay	352
6.	Bandung Kidul	119
7.	Bandung Kulon	306
8.	Bandung Wetan	102
9.	Batununggal	377
10.	Bojongloa Kaler	265
11.	Bojongloa Kidul	251
12.	Buahbatu	112

13.	Cibeunying Kaler	136
14.	Cibeunying Kidul	236
15.	Cibiru	242
16.	Cicendo	174
17.	Cicadap	98
18.	Cinambo	76
19.	Coblong	306
20.	Gedebage	74
21.	Kiaracondong	323
22.	Lengkong	111
23.	Mandalajati	123
24.	Panyileukan	66
25.	Rancasari	93
26.	Regol	141
27.	Sukajadi	270
28.	Sukasari	64
29.	Sumur Bandung	68
30.	Ujung Berung	218

Jumlah	5359
--------	------

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung(2018)

Tabel 1.5
Rekap Jumlah Penyandang Disabilitas Per-Kecamatan
Kota Bandung Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Andir	267
2.	Antapani	84
3.	Arcamanik	149
4.	Astanaanyar	129
5.	Babakan Ciparay	352
6.	Bandung Kidul	119
7.	Bandung Kulon	306
8.	Bandung Wetan	102
9.	Batununggal	377
10.	Bojongloa Kaler	265
11.	Bojongloa Kidul	251
12.	Buahbatu	112
13.	Cibeunying Kaler	136

14.	Cibeunying Kidul	236
15.	Cibiru	242
16.	Cicendo	174
17.	Cicadap	98
18.	Cinambo	76
19.	Coblong	306
20.	Gedebage	74
21.	Kiaracondong	323
22.	Lengkong	111
23.	Mandalajati	123
24.	Panyileukan	66
25.	Rancasari	93
26.	Regol	141
27.	Sukajadi	270
28.	Sukasari	64
29.	Sumur Bandung	68
30.	Ujung Berung	218
Jumlah		5359

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung(2019)

Tabel 1.6
Rekap Jumlah Penyandang Disabilitas
Berdasarkan Jenis Disabilitas

NO	Nama Kategori	Jumlah
1.	Cacat Fisik dan Mental	1131
2.	Cacat Mental Retardasi	410
3.	Mantan Penderita Gangguan Jiwa	1380
4.	Tuna Daksa/Cacat Tubuh	94
5.	Tuna Netra, Rungu, dan Wicara	76
6.	Tuna Netra/Buta	625
7.	Tuna Rungu	359
8.	Tuna Rungu dan Wicara	184
9.	Tuna Rungu Wicara dan Cacat Tubuh	106
10.	Tuna Rungu, Wicara, Netra dan Cacat Tubuh	143
11.	Tuna Wicara	229
12.	Tuna Netra dan Cacat Tubuh	621
Jumlah		5359

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung(2019)

Berdasarkan program pemerintah maka Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk merealisasikan kota ramah disabilitas dan kota yang aksesibilitas terhadap

penyandang cacat, baik secara fisik maupun non fisik. Namun pada kenyataannya aksesibilitas secara fisik terbukti bahwa kota Bandung diwilayah tertentu masih terdapat banyak trotoar yang masih belum layak digunakan oleh penyandang disabilitas, bahkan fungsi dari trotoar tersebut menjadi alih fungsi sebagai lahan parkir liar dan lapak bagi pedagang kaki lima di kota Bandung. Penyediaan akses disabilitas di kota Bandung hanya tersedia di beberapa titik seperti yang berada pada jalan persimpangan Asia Afrika hingga jalan Tamblong. Kemudian terdapat juga di jalan Dewi Sartika hingga jalan Kepatihan.

Table 1.7
Rekap Daftar pekerjaan Trotoar
Tahun 2013-2019

No	Nama Pekerjaan	Tahun	Kontruksi	Keterangan
1.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jl. Pagarsih Barat	2013		
2.	Peningkatan jalan saluran, dan trotoar Jl. Pasir Koja	2013		
3.	Pembangunan saluran dan trotoar Jl. Rontgen	2013		
4.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Leumah Ndeut, Jalan Sariwangi (Lanjutan)	2013		
5.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar dan Jalan Siliwangi	2013		
6.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar dan Jalan Pelesiran	2013		
7.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Astana Anyar (Lanjutan)	2013		
8.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Tamika	2013		
9.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Bojong Raya	2013		
10.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Cibaduyut Raya, Jalan Cibaduyut Lama	2013		
11.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Dewi Sartika, Jalan Dalem Kaum	2013		
12.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Gatot Subroto	2013		
13.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Cikawao	2013		
14.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Malabar	2013		

15.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Lengkong Besar	2013		
16.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Cisaranten Kulon	2013		
17.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Golf Selatan	2013		
18.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Ahmad Yani Kota Bandung	2013		
19.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Dr. Sutomo	2013		
20.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Suryalaya	2013		
21.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Merdeka	2013		
22.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Ganesha	2013		
23.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Caringin	2013		
24.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Kopo	2013		
25.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Cijerah Raya	2013		
26.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Chihampelas	2013		
27.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Sada Keling	2013		
28.	Peningkatan Jalan, saluran dan trotoar Jalan Puskesmas Cempaka Arum	2013		
29.	Peningkatan jalan dan trotoar Jalan Cianjur (Lanjutan)	2013		
30.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Tamansari	2013		
31.	Pembangunan saluran dan trotoar kelengkapan jembatan dan TPT jalan sejajar TOL (lanjutan)	2013		
32.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Sawung Galing	2013		
33.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Banda	2013		
34.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Moh. Thoha	2013		
35.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Burangrang	2013		
36.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Sekajati	2013		
37.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Plasari	2013		
38.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Gudang Utara	2013		
39.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Buah Batu	2013		
40.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Gegerkalong Hillir	2013		
41.	Pembangunan saluran dan trotoar	2013		

	Jalan Venus Raya			
42.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Rajawali Timur	2013		
43.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Kesatria	granit 2013		
44.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Raya Sunda	2013	Andesit	
45.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Ottoiskandardinata	2013	Andesit	
46.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Bapak Husen	2013	Andesit	
47.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Leuwipanjang	2013		
48.	Pembangunan saluran, trotoar, dan Jalan Ibrahim Adjie			
49.	Pembangunan trotoar , saluran dan Jalan Sukabumi	2013	Andesit	
50.	Pembangunan trotoar , saluran dan Jalan Cibatu Raya	2013	Andesit	
51.	Pembangunan trotoar , saluran dan Jalan Subang	2013	Andesit	
52.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Terusan Saluyu	2013	Andesit	
53.	Pembangunan trotoar dan saluran Jalan Martadinata Segmen 2	2014	Granit	
54.	Pembangunan trotoar dan saluran Jalan Braga	2014	Granit	
55.	Pembuatan trotoar, saluran dan Jalan Caringin	2014	Beton pola	
56.	Pembuatan trotoar dan saluran Jalan Holis Segmen 1	2014	Beton pola	
57.	Pembuatan trotoar dan saluran Jalan Holis Segmen 2	2014	Beton pola	
58.	Pembangunan trotoar Jalan Martadinata segmen 1	2014	Granit	
59.	Pembangunan trotoar Jalan Asia Afrika	2015	Granit	
60.	Pembangunan trotoar Jalan Martadinata (lanjuta)	2015	Granit	
61.	Pembangunan trotoar Jalan Wastukencana	2015	Granit	
62.	Pembangunan trotoar Jalan Ibrahim Adjie sisi timur	2015	Beton pola	
63.	Pembangunan trotoar jalan Lekong kecil	2015	Beton pola	
64.	Pembangunan trotoar Jalan Jakarta	2015	Beton pola	
65.	Pembangunan trotoar Jalan Sudirman	2015	Granit	
66.	Pembangunan trotoar Jalan Dalem Kaum	2015	Beton pola	
67.	Pembangunan trotoar Jalan Leuwipanjang	2015	Beton pola	
68.	Pembangunan trotoar Jalan Purnawarman	2015	Beton pola	
69.	Pembangunan trotoar Jalan Banceuy	2015	Granit	
70.	Pembangunan saluran, trotoar Jalan	2015	Granit	

	Asia Afrika segmen 3			
71.	Pembangunan saluran, trotoar, jalan , di Jalan Ibrahim Adjie	2016	Beton pola	
72.	Pembangunan trotoar Jalan H.Juanda segmen 1	2016	Granit	
73.	Pembangunan trotoar Jalan H. Juanda segmen 2	2016	Granit	
74.	Pembangunan trotoar Jalan Martadinata segmen 3	2016	Granit	
75.	Pembangunan trotoar Jalan Ibrahim Adjie (sisi barat)	2016	Granit	
76.	Pembangunan trotoar Jalan Ahmad Yani segmen 1	2016	Granit	
77.	Pembangunan trotoar Jalan Cibaduyut Raya	2016	Granit	
78.	Pembangunan trotoar Jalan Buah Batu segmen 1	2016	Granit	
79.	Pembangunan trotoar Jalan Otto Iskandardinata segmen 1	2016	Granit	
80.	Pembangunan trotoar Jalan Sudirman segmen 1	2016	Granit	
81.	Pembangunan saluran dan trotoar Jalan Sriwijaya (sisi barat)	2016	Beton pola	
82.	Pembangunan trotoar Jalan Kopo segmen 2	2016	Beton pola	
83.	Pembangunan trotoar Jalan Cibadak segmen 1	2016	Beton pola	
84.	Pembangunan trotoar Jalan Kopo segmen 3	2016	Beton pola	
85.	Pembangunan trotoar Jalan Moh Thoha	2016	Beton pola	
86.	Pembangunan trotoar Jalan Aceh	2016	Beton pola	
87.	Pembangunan trotoar Jalan Dipati Ukur segmen 1	2016	Granit	
88.	Pembangunan trotoar Jalan Sukabumi	2016	Granit	
89.	Pembangunan trotoar Jalan Hariang Banga	2017	Beton pola	
90.	Pembangunan trotoar Jalan setia budi	2017	Granit	
91.	Pembangunan trotoar Jalan Elang Raya	2017	Beton pola	
92.	Pembangunan trotoar Jalan Aceh (jl Banda-kalimantan)	2017	Granit	
93.	Pembangunan trotoar Jalan Tamansari	2017	Beton pola	
94.	Pembangunan trotoar sulanjana	2017	Beton pola	
95.	Pembangunan trotoar Jalan Ghanesa	2017	Granit	
96.	Pembangunan trotoar Jalan Sudirman segmen 2	2017	Granit	
97.	Pembangunan trotoar Jalan Pahlawan	2017	Beton pola	
98.	Pembangunan trotoar Safety road 2 (alun-alun)	2017	Granit	
99.	Pembangunan trotoar Jalan Cibadak segmen 2	2017	Beton pola	
100.	Pembangunan trotoar Jalan Siliwangi	2017	Beton pola	
101.	Pembangunan trotoar jalan Katamso	2017	Beton pola	
102.	Pembangunan trotoar Jalan Merdeka	2017	Granit	
103.	Pembangunan trotoar Jalan	2017	Granit	

	Wastukencana			
104.	Pembangunan beton pola Jalan Kebon Jukut	2018	Beton pola	
105.	Pembangunan trotoar granit Jalan Perintis kemerdekaan	2018	Granit	
106.	Pembangunan trotoar beton pola Jalan Stasiun Timur	2018	Beton pola	
107.	Pembangunan Jalan Banda (proses pelaksanaan)	2019		
108.	Pembangunan pada jalan terusan Gatot Subroto (Kiraracondong)	2019		
109.	Pembangunan Akses menuju sekolah	2019		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung(2019)

Dari table di atas dapat dilihat bahwasanya akses yang seharusnya sudah aksesible masih belum diterapkan pada jalan dan trotoar yang ada di Kota Bandung, akan tetapi hanya baru dalam bentuk pembangunan jalan biasa, pembangunan trotoar biasa yang tidak disertakan dengan akses yang ditujukan bagi penyandang disabilitas, serta pembangunan saluran di jalanan yang ada pada Kota Bandung.

Adapun permasalahan terkait penyandang disabilitas berikutnya yaitu penyediaan taman untuk penyandang disabilitas yang salah satunya yaitu taman inklusi. Dimana taman inklusi tersebut belum dilengkapi sarana dan prasarana yang dapat diakses bagi para penyandang disabilitas seperti halnya akses pintu masuk pada taman ini yang ditanam empat besi penghalang, sehingga akses tersebut hanya bias dilalui oleh pejalan kaki dan tidak akses bagi pengguna kursi roda. Selanjutnya terdapat akses bagi penyandang tunanetra namun di beberapa tempat tampak rusak berlubang. Akses tunanetra menuju Taman Maluku pun terputus sebelum jembatan kecil yang menghubungkan kedua taman tersebut. Taman tersebut memang belum ramah difabel dan masih banyak yang perlu

diperbaiki seperti pintu gerbang masuk, terdapat beberapa jalan curam untuk pengguna kursi roda, dan toilet yang *accessible* belum tersedia.

Bukan hanya di tempat umum saja bahkan di tempat ibadah pun beberapa akses Kota Bandung masih belum terciptanya aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas seperti halnya terdapat tangga menuju masjid yang susah dilalui bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda,, pengelolaan tempat berwudhu yang belum menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Permasalahan berikutnya yaitu aksesibilitas secara non fisik yang mana pada aksesibilitas ini pada pasal 29 ayat 2 huruf b, disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus, yang mana pada pelayanan khusus ini berupa pemberian motivasi yang diberikan kepada para penyandang disabilitas. Akan tetapi pada pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Bandung masih belum efektif dalam pemberian motivasi tersebut. Seharusnya pemberian motivasi dilakukan minimal tiga bulan dalam pemberian motivasi kepada penyandang disabilitas, akan tetapi kaena faktor kurangnya sumberdaya dalam proses pembantuan, dan terhalang oleh anggaran dana sehingga menyebabkan pemberian pelayanan khusus kepada disabilitas masih belum efektif dalam pelaksanaannya. (wawancara dengan Ibu Indra Afianty Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Rehabilitas Dinas Sosial Kota Bandung).

Berkaitan dengan permasalahan dan kondisi tersebut, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Aksesibilitas Ramah Difabel Di Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah dan data yang disajikan pada latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dengan penerapan Peraturan Daerah No 26 tahun 2009 tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Bandung
2. Bagaimana dengan penanganan masalah terhadap penyandang disabilitas di Kota Bandung yang masih rendah.
3. Bagaimana dengan fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Bandung ?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dibidang ketenagakerjaan

b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah dan institusi atau perusahaan untuk mensukseskan teknis dan konsepsi peraturan tentang ketenagakerjaan.

b. Dapat berguna sebagai pertimbangan dalam suatu kebijakan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian yang memiliki peran penting pada suatu penelitian ilmiah. Penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah tentang aksesibilitas penyandang cacat ramah difabel di Kota Bandung merupakan kajian dari administrasi publik hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Keban (2014:11) bahwa ada enam dimensi pada kajian administrasi publik salah satunya adalah dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut.

Suatu kebijakan publik dibuat untuk mengatasi dan menjawab permasalahan maupun hambatan yang berada di masyarakat sekitar. Kebijakan publik dibuat dengan berbagai cara agar semua orang bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah agar kehidupan bermasyarakat lebih terarah dan teratur. Kebijakan publik dapat juga dikatakan sebagai bagian dari proses administrasi publik yang bertujuan untuk mengatasi dan menjawab masalah yang dihadapi masyarakat.

Seberapapun banyaknya suatu kebijakan tanpa adanya pelaksanaan atau implementasi itu tidak akan berarti sama sekali. Ibaratnya implementasi itu cara untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Karena pada prinsipnya setiap kebijakan publik harus ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan Publik merupakan suatu tahapan yang sangat penting karena merupakan suatu realisasi dari apa yang telah dirancang oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat membawa manfaat dan diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar kebijakan asal Afrika yaitu Udoji, dalam Agustino (2006 : 154) mengatakan bahwa *“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”*. (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan oleh pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Gejala tersebut dinamakan *Implementation Gap*. Atau dapat diartikan merupakan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan

selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antar yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam khazanah keilmuan kebijakan publik, terdapat banyak ahli yang mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan publik. Beberapa ahli tersebut salah satunya menurut Van Meter dan Van Horn, Mazmanin dan Sabatier, Hoodwood dan Gun, goggin Bowman dan Lester, grindel, elmore, Edward III, Nakamura & smallood.

Pada penelitian ini, saya selaku peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn berdasarkan pertimbangan sesuai kondisi di lapangan. Donald Van Meter dan Carl Van Horn menciptakan sebuah pemikiran yang berfokus pada model implementasi kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2008:142) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini berawal

dari suatu asumsi bahwa proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat kebijakan yang dilaksanakan.

Pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan peraturan yang membahas seputar permasalahan penyandang disabilitas. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 tahun 2009 tentang penyandang disabilitas. Dilihat dari tahun pembuatannya, maka Peraturan tersebut seharusnya sudah berlangsung selama 9 tahun. Tugas dan wewenang dari pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut ialah mengatur, memfasilitasi, serta mengelola persoalan seputar penyandang disabilitas. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 itu, maka perlu dilakukan analisis mendalam. Dengan alasan tersebut, maka peneliti memilih untuk menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:155) menawarkan karakteristik dalam proses implementasi yakni, pertama proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Adapun dalam Agustino (2014:142) terdapat enam variabel model yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn. Ke enam variabel dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ukuran dan Standar Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan rasio–kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap –tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat

sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab bagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn adalah tiga bentuk sumberdaya tersebut.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pada pengimplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting. Karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/ kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilakukan oleh seorang *implementator* atau pelaksana adalah kebijakan "dari atas ke bawah" (*top down*) para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya. Jadi komunikasi ini merupakan hal yang cukup penting juga, untuk menghindari adanya kesalahan komunikasi, perbedaan pendapat dan penyampaian informasi yang tidak akurat.

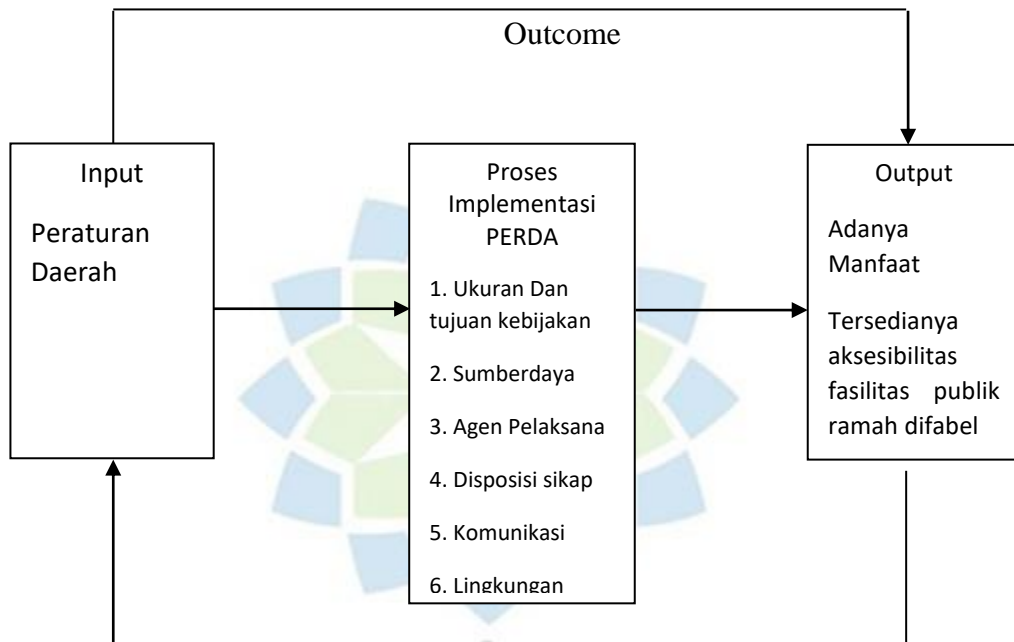
f. Lingkungan Ekonomi, sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik

yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik disekitar.

Dari model implementasi kebijakan melalui enam variabel implementasi kebijakan tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dan pendukung dalam implementasi kebijakan persoalan ketenagakerjaan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya seperti hambatan dalam upaya mengetahui ukuran standar tujuan kebijakan, penyediaan sumberdaya yang, karakteristik agen pelaksana yang dimiliki setiap individu, sikap para pelaksana yang bermacam-macam karakternya, komunikasi antar organisasi yang harus secara terus menerus terpantau, serta dukungan dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang berkembang. Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut peneliti dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut agar hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan sebaik mungkin

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Aksesibilitas Penyandang Cacat dalam meningkatkan Infrastruktur Ramah Difabel Kota Bandung akan berjalan efektif dan efisien. Apabila dalam pelaksanaan implementasi kebijakan memenuhi indicator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementator, komunikasi organisasi, kondisi lingkungan ekonomi sosial.